BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Periode 1976–1996 Indonesia mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan namun kemudian meningkat tajam seiring munculnya krisis multidimensi tahun 1997. Tahun 1976 jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 54.2 juta jiwa atau (42.1%), berkurang menjadi 27,2 juta (28.56%) pada tahun 1980. Tahun 1996 berkurang lagi menjadi 22,5 juta (15.08%), tetapi tahun 1998 jumlah penduduk miskin diperkirakan lebih dari 49.5 juta jiwa (24.23%). Meskipun sampai tahun 2003 terjadi penurunan namun dirasakan masih sangat lambat (Djalal, 2003).

Tabel 1.1
Angka Kemiskinan di Indonesia

Tahun	Penduduk Miskin (Juta)	%
1976	54,2	42.14
1980	27,2	28,56
1996	22,5	15,08
1998	49,5	24,23
2000	37,3	18,95
2001	37,9	18,41
2002	38,4	18,20

Sumber : Djalal 2003

Sebagian besar penduduk miskin tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian pokok sebagai petani, nelayan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional. Latar belakang pendidikan umumnya rendah

dan ketergantungan terhadap alam tergolong tinggi. (UNESCO, 1998:25-26, Todaro, 2000:200-202).

Perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling merasakan dampak kemiskinan. Umumnya mereka menderita kekurangan gizi, pendidikan terbatas bahkan tidak pernah sama sekali (UNESCO, 1998:56-57). Kaum perempuan dalam kelompok masyarakat miskin seringkali tidak berdaya. Pekerjaan mereka sering lebih berat dibanding laki-laki tetapi jarang sekali dinilai secara finansial (Todaro, 2000:201-205). Perempuan juga lebih sedikit memperoleh pelayanan kesehatan, air bersih, kecukupan gizi, akses terhadap pendidikan, sanitasi sehat serta berbagai bentuk layanan sosial lainnya (Tilaar, 1997:215-218, Moulton, 1987:9).

Kemiskinan memiliki dampak sosial berjangka panjang dan dapat merusak tatanan sosial budaya, meniadakan rasa kemanusiaan, menghapus hubungan kekeluargaan, bahkan bisa membawa seseorang pada kekufuran, berpaling dari nilai-nilai agama yang dianut. Meskipun tidak mudah untuk digeneralisasi, namun dalam berbagai kasus ditemukan banyak perempuan yang rela melakukan apa saja agar bisa bertahan hidup, mempertahankan keutuhan keluarga atau mempertahankan agar anak-anaknya bisa terus bersekolah. Banyak pula yang akhirnya menjadi pengemis atau menjadi pelacur karena tidak memiliki keterampilan, pendidikan terbatas, karena terpaksa, dijerumuskan oleh orang lain, atau terdorong oleh keinginan untuk mengatasi permasalahan hidup dengan mengambil jalan pintas (Kartono, 1988: 234, Todaro, 2000:203-205). UNESCO (1998:56) memperkirakan persentase perempuan yang menjadi pelacur dan

pengemis karena faktor ekonomi rata-rata meningkat lebih dari 50 % per tahun selama 20 tahun terakhir.

Fenomena yang juga patut menjadi perhatian adalah makin banyaknya perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Mereka harus bekerja dengan jumlah jam yang tanpa batas agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tahun 2003 sebagaimana dikemukakan oleh Hubies (Kompas, 12 April 2004:42), 16 % kepala rumah tangga di Indonesia adalah perempuan. Pada umumnya terjadi karena perceraian dan sebagian besar adalah keluarga miskin.

Jumlah perempuan yang harus berperan ganda cenderung meningkat dan makin kompleks. Bagi sebagian perempuan dari golongan menengah ke atas bekerja adalah bagian dari kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau sebagai wadah menyalurkan hobi, bakat atau keahlian yang dimiliki. Bagi perempuan dari golongan menengah ke bawah atau masyarakat miskin, punya suami ataupun tidak, bekerja adalah tuntutan. Mereka bekerja karena ekonomi rumah tangga mengharuskan mereka bekerja. Mereka telah terbiasa bekerja sambil mengasuh anak, dengan jumlah jam yang tanpa batas, dan dengan upah rendah (Todaro, 2000: 410-411, Abdullah, ed, 2003:239).

Beban ganda yang harus dipikul perempuan sering membuat mereka berada pada pilihan sulit. Oleh karena bekerja adalah satu keharusan, maka seringkali mereka melakukan pekerjaan tanpa petimbangan yang matang, apa pun jenis pekerjaan tersebut. Situasi yang mendesak menyebabkan mereka mudah dipermainkan, sering menerima pekerjaan yang sangat berat dengan upah rendah, sering mengalami kekerasan, perlakuan yang diskriminatif, dan sering pula

mengerjakan jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan keinginan dan kemampuan fisik mereka.

Bagi masyarakat Sumatera Barat yang menganut sistem kekerabatan *matrilineal* seperti di Kabupaten Solok, kemiskinan juga merupakan masalah yang sangat mencemaskan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok tergolong tinggi. Tahun 2004 jumlahnya mencapai 27,76 % dari jumlah penduduk. Jumlah ini dikhawatirkan akan terus bertambah karena belum stabilnya perkembangan ekonomi dan lonjakan harga BBM (BPS dan Bappeda Kab. Solok, 2004:120).

Tingginya angka kemiskinanan tersebut tampak pula pada banyaknya keluarga pra sejahtera dan prasejahtera I seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I
Di Kabupaten Solok

Tahun	Jumlah Keluarga	*Keluarga Pra-Sejahtera*	*Keluarga Sejahtera I*
1999	94.013	775	28.871
2001	97.623	1.068	38.238
2003	103.310	1.155	39.041
2004	105.230	1.104	40.027

Sumber: BPS & Bappeda Kab. Solok 2004:121

Salah satu faktor yang diduga sebagai penyebab tingginya angka kemiskinan ini adalah rendahnya kemampuan SDM dan tingginya ketergantungan terhadap pertanian. Tahun 2003 tercatat 70,1 % perekonomian penduduk bergantung pada sektor pertanian, sementara tujuh bulan dalam setahun tergolong musim kemarau. Kondisi ini diperberat pula oleh tidak seimbangnya laju pertumbuhan kebutuhan penduduk dengan pertumbuhan dan produktifitas lahan. Di samping itu, setiap tahun rata-rata 0,4 % lahan pertanian produktif berubah fungsi menjadi

pemukiman atau menjadi fasilitas umum (BPS dan Bappeda Kab. Solok, 2004:120-121)

Mayoritas petani di Kabupaten Solok adalah petani kecil yang memiliki lahan kurang dari 0,25 ha. Sebagian lagi adalah buruh tani atau petani tanpa lahan. Petani yang memiliki lahan di atas 0,25 % hanya sekitar 20 % (BPS dan Bappeda Kab. Solok, 2004). Keadaan ini secara umum mempengaruhi struktur pendapatan penduduk seperti tampak pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Persentase Penduduk Kabupaten Solok Menurut Pendapatan/Gaji Bersih yang Diterima Perbulan tahun 2003

No	KECAMATAN	≥250.000 (%)	250.001 - 500,000 (%)	500,001 750,000 (%)	750,001 1,000,000 (%)	1.000.001 ≥ (%)
1	Pantai Cermin	3.37	3.89	0.78	0.65	1.42
2	Lbh. Gumanti	1.3	0.91	0.52	0.26	0.78
3	Hiliran Gumanti	0.78	0.52	0.39	0.26	0.13
4	Payung Sekaki	0.91	0.91	*na*	0.39	0.65
5	Tigo Lurah	0.39	0.39	0.26	0.13	0.39
6	Lembang Jaya	0.13	1.04	0.39	0.39	0.52
7	Danau Kembar	0.26	0.13	*na*	0.13	0.26
8	Gunung Talang	0.91	5.57	0.91	1.17	4.02
9	Bukit Sundi	3.37	4.79	2.2	0.39	0.52
10	IX Kt Sei Lasi	0.13	0.65	0.52	0.13	0.39
11	Kubung	2.85	6.74	4.66	3.24	6.87
12	X Koto Diatas	2.46	5.83	2.07	0.26	0.91
13	X Kt. Singkarak	1.81	4.66	1.3	0.91	2.2
14	Junjung Sirih	1.94	1.42	0.39	0.26	*na*
Jumlah Total Kabupaten Solok		**20,60**	**37,47**	**14.38**	**8.55**	**19.04**

Sumber: BPS dan Bappeda Kabupaten Solok, 2004:112

Tabel di atas menunjukkan bahwa 58,04 % penduduk dewasa (usia 10 tahun ke atas) di Kabupaten Solok memperoleh penghasilan (gaji bersih) rata-rata Rp 250.000 s/d Rp 500.000,- per bulan, bahkan 20,60 % berpenghasilan di bawah Rp 250.000,- per bulan, 8,5 % berpenghasilan antara Rp 750.000 sampai Rp

1.000.000,-. Hanya 19,04 % penduduk yang berpenghasilan di atas Rp 1.000.000,- Mereka umumnya adalah pegawai negeri, pedagang atau wirausahawan (wiraswasta) yang tinggal di sekitar kawasan ibu kota Kabupaten Solok, terutama Kecamatan Kubung dan Kecamatan Gunung Talang (BPS dan Bappeda Kab. Solok, 2004: 112).

Krisis ekonomi yang masih belum pulih berakibat pula pada sulitnya kehidupan di perantauan yang selama ini sangat menopang kesejahteraan sebagian penduduk yang tinggal di kampung. Tidak sedikit pula yang pulang ke kampung meskipun tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kondisi ini makin memperberat beban sosial ekonomi yang harus ditanggung masyarakat. Akibatnya angka putus sekolah di tingkat SD dan SMP memperlihatkan angka yang relatif tinggi. Tahun 1999-2000 angka DO SD tercatat 6,47 % dan DO SMP 4,63 %. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding sebelum krisis yang rata-rata di bawah 3,5 % untuk tingkat SD dan di bawah 3.0 % di tingkat SMP/MTs (Dinas P & K Kab.Solok, 2002).

Sebagian besar (51,19 %) penduduk Kabupaten Solok adalah perempuan, namun secara kualitatif kehidupan mereka lebih rendah dibanding laki-laki. Keadaan ini tampak pada; (1) rata-rata lama bersekolah; perempuan 6,0 tahun, laki-laki 6,8 tahun, (2) angka melek huruf pada orang dewasa; perempuan 93 %, laki-laki 96,4%. (3) perbandingan pemerolehan pendapatan dan akses terhadap ekonomi (*income earning share*); perempuan 38 %, laki-laki 62 %, (4) angka partisipasi perempuan dalam lapangan kerja telah mencapai 42,04 %, tetapi sebagian besar (76,01 %) bekerja pada sektor pertanian. Perempuan yang bekerja pada sektor pertanian pada umumnya sering dianggap membantu keluarga dan

tidak dihargai secara finansial. Keadaan ini sangat ironis dengan kedudukan dan status perempuan menurut ajaran adat Minangkabau (BPS dan Bappeda Kab. Solok 2004:136, Nasroen, 1957:120, Latief, 2002:105-107).

Jumlah perempuan yang membutuhkan lapangan kerja semakin meningkat, bahkan cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki. Data yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Solok menunjukkan bahwa 61,38 % pencari kerja yang terdaftar tahun 2003/2004 adalah perempuan. Dari keseluruhan pencari kerja yang terdaftar tersebut, 61,07 % berpendidikan SLTA dan 33,98 % tamat perguruan tinggi, diploma dan sarjana. Sisanya berpendidikan SLTP ke bawah. Hal ini berarti pula bahwa tingkat pengangguran terdidik pada perempuan cenderung semakin tinggi dan menunujukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun seperti tergambar pada tabel berikut ini:

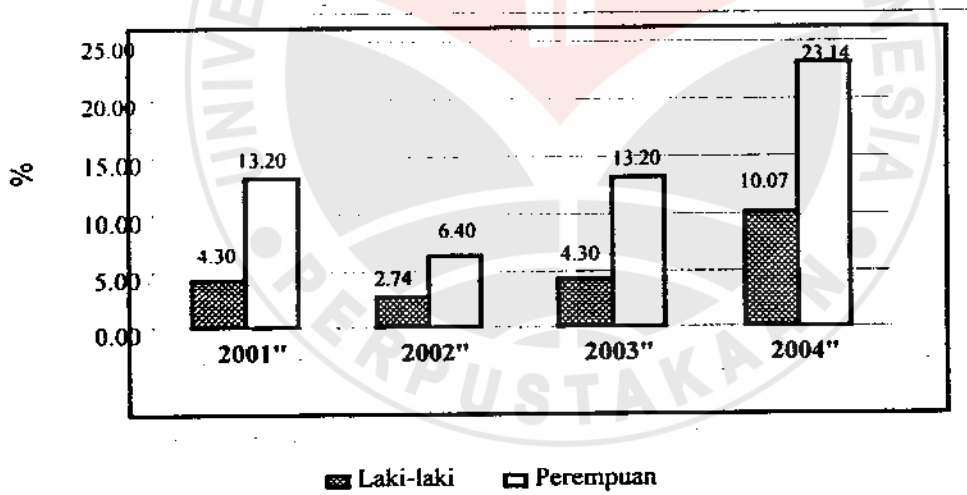

Sumber: Data Ketenagakerjaan BPS Kab.Solok, 2004, Elfindri, 2005

Gambar 1.1. Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Solok tahun 2001-2004

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UPT PERPUSTAKAAN

Permasalahan lainnya yang patut dicermati adalah bahwa kesulitan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata ikut pula memicu terjadinya perceraian. Pihak yang paling merasakan akibatnya adalah perempuan dan anak-anak. Sepanjang tahun 1998-2002 di Kabupaten Solok tercatat 888 kasus perceraian. Pada masyarakat berlatar budaya Minangkabau, ketika terjadi perceraian maka pihak perempuanlah yang akan membesarkan dan merawat anak-anak. (BPS Kab.Solok, 2003:110). Kondisi ini semakin memperkuat pandangan yang menyatakan bahwa faktor ekonomi seperti kemiskinan dan kesenjangan melahirkan pola hidup masyarakat yang berbeda dengan apa yang dianut sebelumnya (Kuntowijoyo, 1987:7).

Beban kemiskinan yang ditanggung perempuan dipastikan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap generasi berikutnya. Perempuan yang miskin dan tidak terdidik cenderung melahirkan generasi yang miskin pula. Kemiskinan pun dapat menjadi akar dari kejahatan dan kehancuran moral (Suhamijaya, 2003:13). Pada sebagian perempuan mereka dibebani pula oleh perlakuan yang diskriminatif, *sub-ordinasi*, *stereotype*, pelecehan, bahkan kekerasan (*violence*), tidak saja di tengah masyarakat tetapi juga dalam keluarga sendiri (Prijono & Pranarka, 1996:213-219, Abdullah, 2003:16-18).

Perempuan pada dasarnya mampu menjadi bagian dari kekuatan dan modal dasar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Perempuan pun mampu menjadi subjek (aktor) sekaligus sebagai objek pembangunan nasional, menjadi pelopor di berbagai bidang kehidupan, menjadi pelaku ekonomi bahkan menjadi pemimpin di tengah masyarakat. UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang, laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga

negara, hak berpolitik, persamaan di depan hukum, hak memperoleh pekerjaan yang layak serta hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dalam konteks ini, program pemberdayaan perempuan seharusnya memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya dalam aspek psikologis tetapi juga dalam aspek sosial, budaya dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Namun hal ini belum terwujud sepenuhnya karena perempuan masih sering dianggap 'tidak mampu' bahkan dianggap tidak pantas menurut sebagian pandangan. Program pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan justru cenderung mengokohkan posisi perempuan sebagai ibu rumah tangga. Di sisi lain, ketika kebutuhan ekonomi tidak tercukupi dengan baik, perempuan justru dituntut untuk ikut bekerja meskipun dengan pengetahuan dan keterampilan seadanya. Ketika rumah tangga tidak berjalan sebagaimana diharapkan, penderitaan terberat jusru ditanggung oleh perempuan. Pikiran-pikiran tersebut pula yang melatarbelakangi penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah

Pendidikan untuk pemberdayaan perempuan adalah bagian dari pendidikan nonformal (pasal 26 UUSPN No 20 tahun 2003). Hakekat pemberdayaan dalam hal ini adalah meningkatkan kecakapan, kemandirian (*self-reliance*) dan kekuatan diri (*internal strength*) untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Istilah pemberdayaan perempuan sering pula digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi agar terbebas dari kemiskinan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UPT PERPUSTAKAAN

[illegible]ngan dan meningkatkan harkat kemanusiaan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Moulton (1997:2-3) dan Suhamijaya (2003:13-14) mengemukakan bahwa pihak yang paling strategis untuk meningkatkan harkat kemanuasiaan dan mengentaskan kemiskinan walaupun membutuhkan waktu lama adalah pendidikan. Oleh karena alasan tersebut pula *Fourth World Conference on Women* 1995 di Beijing memberikan perhatian serius terhadap akses pendidikan bagi perempuan. *Platform for Action* yang dihasilkan dalam konferensi tersebut menyerukan agar semua negara di dunia; (1) memperbaiki akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan, sain dan teknologi serta pendidikan berkelanjutan, (2) mengembangkan pendidikan dan latihan atas dasar nondiskriminasi, (3) mengalokasikan sumber dana yang cukup bagi implementasi dan memonitor pembaharuan pendidikan, (4) memajukan pendidikan dan pelatihan seumur hidup bagi perempuan dan remaja putri. Semangat Beijing ini terdapat pula dalam *Dakkar Framework for Action* yang menghendaki setiap negara di dunia membangun pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas bagi semua anak dan pendidikan *life skill* bagi pemuda, tanpa diskriminasi (Prijono & Pranarka, 1996: 208-211, Tilaar, 1999:222-230, UNESCO, 2000:5-6).

Effendi, (1993:201-202) dan Sudjana, (2000a;259) mengemukakan bahwa kemiskinan pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal yang saling berkaitan. *Pertama;* keterbatasan modal dan sumberdaya untuk kesejahteraan, misalnya; tidak memiliki lahan yang memadai atau tidak memiliki pekerjaan tetap sebagai sumber ekonomi. *Kedua;* hambatan struktrural yang berasal dari diri sendiri dan lingkungan; pendidikan terbatas, derajad kesehatan rendah, tidak memiliki

keterampilan, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. *Ketiga;* hambatan-hambatan sosial budaya yang menyebabkan seseorang tidak bisa memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia seperti *setereotype*, tradisi, diskriminasi, marjinalisasi, dan sebagainya. Artinya, untuk memutus lingkaran dan kompleksitas kemiskinan diperlukan pendidikan yang berkualitas, relevan, menyeluruh, berkelanjutan, dan terpadu.

Pembangunan merupakan perpaduan antara pengorganisasian masyarakat agar terbebas dari keterbelakangan dengan pengembangan dan pemerataan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan. Permasalahan pokok keterbelakangan pada dasarnya adalah ketidakmampuan mengatasi keterbelakangan tersebut dan menghilangkan rintangan-rintangan seperti sikap tradisional, malas, pasrah pada nasib, dan ketergantungan yang tinggi terhadap lingkungan, baik individual maupun kolektif. Oleh karena itu pendidikan merupakan faktor kunci pemberdayaan. Namun pendidikan saja tidak cukup tanpa didukung oleh akses yang memadai terhadap ekonomi dan pendapatan. Bagi perempuan, selain memperbaiki akses terhadap pendidikan mereka juga harus memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk hidup mandiri dan terlibat aktif dalam berbagai aktifitas sosial, ekonomi bahkan politik, bebas dari diskriminasi, marjinalisasi dan perlakuan lainnya yang merugikan mereka (Coombs & Ahmed, 1984:25-30, Todaro, 2000, 245, Moulton, 1997:5-7)

Jumlah perempuan yang lebih dari separoh jumlah penduduk, seperti di Kabupaten Solok, merupakan modal dasar berupa sumber daya manusia dengan segala potensi yang terkandung di dalam dirinya. Beberapa penelitian menunjukan bahwa perempuan terdidik dan memiliki penghasilan sendiri lebih siap menjadi

tumpuan ketahanan rumah tangga dan mengambil alih kemudi ekonomi keluarga ketika relasi dengan suami atau dengan keluarga lainnya tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Mereka juga memiliki posisi tawar yang lebih tinggi di tengah masyarakatnya.

Penelitian World Bank di berbagai negara membuktikan bahwa negara-negara yang investasinya terhadap pendidikan dan pemberdayaan perempuan tinggi, menikmati produktivitas ekonomi yang tinggi pula. Di tingkat keluarga, perempuan terdidik dan memiliki penghasilan sendiri lebih menguntungkan bagi keluarganya dan melahirkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Apabila sumbangan finansial perempuan dalam satu keluarga meningkat maka tingkat kesejahteraan keluarga secara umum juga meningkat. Oleh karena itu, kesetaraan dalam memperoleh sumber penghasilan harus dilihat sebagai wujud dari hak dan otonomi perempuan (Prijono & Pranarka, 1996:205-214, Moulton, 1997:19, Todaro, 2000: 204-210).

Pendidikan kewirausahaan melalui pelatihan keterampilan, pembinaan usaha, dan program belajar sejenis lainnya dapat menjadi bagian terpenting dan sangat strategis dalam proses pemberdayaan perempuan. Setelah mengikuti program pendidikan tersebut, perempuan diharapkan mampu; (1) menjadi individu yang memiliki kepribadian unggul, mandiri dan tangguh (2) berperan aktif sebagai pelaku ekonomi; pengusaha atau tenaga kerja terampil, (3) memiliki sumber penghasilan sendiri, (4) menjadi bagian dari kekuatan sosial ekonomi masyarakat tanpa kehilangan dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai anggota masyarakat, dan (5) membebaskan diri dari jerat kemiskinan, diskriminasi dan marjinalisasi.

Kemampuaun berwirausaha bukan masalah keturunan, bakat atau kesempatan, tetapi adalah sikap dan keterampilan (skill) yang bisa dipelajari dan diajarkan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Ia dapat pula menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa. Bagi masyarakat lapisan bawah atau *grass root level*, pendidikan kewirausahaan merupakan bagian dari proses pemberdayaan mereka (Sudjana, 2000a:130).

Bank Dunia juga menyimpulkan bahwa salah satu cara untuk menjangkau dan mengangkat masyarakat miskin adalah melalui upaya pembangkitan semangat hidup agar dapat menolong diri sendiri. Dalam hal ini cara terbaik adalah menumbuhkan semangat berwirausaha pada semua lapisan masyarakat, berani mengambil resiko, pantang menyerah, berani bersaing dan menemukan hal-hal baru (Hikmat, 2001:4-5).

Dalam PLS, pendidikan kewirausahaan dapat terjadi melalui dua cara. *Pertama:* pendidikan kewirausahaan merupakan program tersendiri, seperti pelatihan, Kelompok Belajar Usaha (KBU), magang, kelompok pemuda produktif, kursus dan satuan belajar sejenis lainnya. *Kedua;* mengintegrasikan pembelajaran kewirausahaan ke dalam kurikulum atau rencana belajar pada kelompok belajar Paket A, Paket B, KF, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan satuan PLS lainnya. Tujuannya adalah agar warga belajarnya; (1) mampu hidup mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dipergunakan sebagai sumber mata pencaharian, (2) memiliki bekal keterampilan untuk hidup lebih produktif, dan (3) mampu membuka usaha sendiri sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga (Sudjana,2000a:130).

Di Kabupaten Solok upaya mendidik dan mengembangkan kemampuan berwirausaha pada perempuan telah cukup lama menjadi perhatian. Namun harus diakui bahwa hasilnya belum memuaskan bahkan masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti pada studi pendahuluan terhadap program PLS di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Solok. Pada studi pendahuluan tersebut diketahui bahwa 61,48% warga belajar pada pelatihan keterampilan, KBU dan magang selama tahun 1995-2002 adalah perempuan. Program belajar yang paling diminati perempuan adalah pelatihan keterampilan anaka kue. Keterampilan aneka kue ini dipandang lebih praktis, fleksibel, berorientasi pada kebutuhan sehari-hari, dan diharapkan membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah rendahnya dampak program belajar terhadap kemandirian dan peningkatan kesejahteraan warga belajarnya. Secara umum tingkat pencapaian tujuan program belajar tidak sebanding dengan besarnya anggaran dan sumber daya yang telah dialokasikan. Dari dialog terbuka dengan beberapa orang warga belajar yang tersebar di empat kecamatan terungkap bahwa tidak tercapainya tujuan yang diharapkan pada setiap program belajar seperti pelatihan keterampilan, KBU maupun magang yang telah mereka ikuti adalah karena tidak jelasnya tindak lanjut setalah program belajar selesai. Meskipun diberikan bantuan modal tetapi karena tidak ada pembinaan dan pengawasan lebih lanjut, bantuan modal yang mereka terima akhirnya dibelanjakan untuk hal-hal yang lebih mendesak.

Wawancara peneliti dengan sebagian kecil yang mampu tumbuh dan berkembang sebagai wirausaha menyimpulkan bahwa keberhasilan mereka

merintis dan mengembangkan usaha lebih disebabkan oleh kehadiran orang-orang (keluarga, teman dekat atau pihak ke tiga) yang memberikan dorongan, bimbingan, bahkan fasilitas. Kehadiran orang-orang tersebut secara perlahan telah membangkitkan kesadaran dan motivasi, menumbuhkan keberanian, dan mempertebal kepercayaan diri untuk merintis dan mengembangkan usaha secara mandiri. Mereka pun berkesimpulan bahwa kesadaran, motivasi, keberanian, dan kepercayaan diri merupakan modal yang paling utama untuk merubah dan meningkatkan keadaan kehidupan sosial ekonomi mereka selain pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Kesimpulan ini diperkuat pula oleh hasil evaluasi Direktorat Jenderal PLSP tahun 2003 di semua program PLS di Indonesia. Begitu pula dengan penelitian Jamna pada kelompok UPPKS di Kota Padang, Sumatera Barat tahun 2002, serta penelitian Ernawati tahun 2002 tentang kewirausahaan perempuan di Sumatera Barat.

Evaluasi Ditjen PLSP menyimpulkan bahwa secara keseluruhan dampak program PLS di Indonesia, terutama pelatihan keterampilan, KBU, dan magang terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat masih belum memuaskan. Besarnya anggaran yang dialokasikan tidak seimbang dengan pencapaian tujuan program. Hal ini ditenggarai terjadi karena kurangnya pembinaan dan keberlanjutan program. Oleh karena itu Ditjen PLSP merekomendasikan pentingnya program penguatan sebagai bentuk pembinaan lebih lanjut (Ditjen PLSP, 2003).

Penelitian Jamna (2002) terhadap program pengentasan kemiskinan melalui Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang

menyimpulkan bahwa kelompok-kelompok UPPKS dalam skala rumah tangga yang terdapat di Kota Padang hampir semuanya berkeinginan untuk mengembangkan usaha terutama dalam meraih keuntungan yang lebih besar. Keinginan mereka diwujudkan dalam bentuk harapan: (1) dapat menjalin kerjasama (kemitraan) dengan pengusaha yang lebih besar, (2) berharap sekali ada pembinaan dari mitra usaha, (3) pembinaan hendaknya tidak mengurangi pendapatan, (4) memiliki standar produk yang baku, (5) ada lembaga atau instansi yang mau bekerjasama dalam pembinaan yang berkelanjutan.

Oleh karena kurangnya pembinaan, hampir keseluruhan kelompok UPPKS tidak berjalan dengan baik dan keluarga yang menjadi sasaran program tetap miskin dan tidak memiliki sumber pendapatan lain. Atas dasar temuan tersebut Jamna merekomendasikan model pembinaan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis budaya Minangkabau yang egaliter. Jamna menyebutnya dengan model pembinaan '*Badunsanak*', yaitu model pembinaan berkelanjutan yang bersifat kekeluargaan berdasarkan prinsip sesakit dan sesenang (Jamna, 2002).

Penelitian Ernawati (2002) terhadap wirausaha perempuan di Sumatera Barat menghasilkan kesimpulan yang hampir sama dengan rekomendasi Jamna (2002). Ia mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan determinatif antara pelatihan dan pembinaan dengan kemampuan dan keberhasilan perempuan mengembangkan usaha. Penelitian tersebut juga merekomendasikan pentingnya model-model pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu. Pelatihan dan pembinaan terpadu adalah pelatihan yang diikuti dengan

pembinaan yang melibatkan pihak-pihak terkait secara sistematis dan berkesinambungan.

Penelitian Sumantri (2000:40-44) dan ADB-SMEP (2002) terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia merekomendasikan pula pentingnya program pembinaan untuk penguatan dan kemajuan usaha mereka. Perempuan membutuhkan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan keberanian dan memperkuat kepercayaan diri dalam merintis dan mengelola usaha.

Atas dasar studi pendahuluan tersebut, peneliti berkeyakinan bahwa program pembelajaran kewirausahaan melalui pelatihan keterampilan, KBU, dan magang akan lebih berhasil apabila ditindaklanjuti dengan pembinaan sampai warga belajarnya dianggap mampu menjalankan usahanya secara mandiri. Belajar keterampilan saja tidak cukup, tetapi harus diikuti dengan proses belajar tertentu yang membantu warga belajarnya agar mampu mandiri, menggali dan mengoptimalkan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga lebih produktif, kreatif dan inovatif. Program belajar demikian sangat strategis sebagai upaya untuk pemberdayaan perempuan.

Pandangan dan penelitian tentang pentingnya pelatihan dan pembinaan untuk menumbuhkembangkan kemampuan berwirausaha tersebut di atas menjadi dasar dalam merumuskan fokus penelitian ini. Penelitian ini berupaya mengkaji dan memperoleh model pelatihan dan pembinaan kewirausahaan berkelanjutan yang efektif sebagai upaya untuk pemberdayaan perempuan. Model yang diperoleh diharapkan pula dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan partisapasi sosial ekonomi perempuan melalui pendidikan nonformal sehingga

keterlibatan perempuan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran semakin nyata.

C. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah pada model pelatihan dan pembinaan kewirausahaan berkelanjutan. Model yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pilihan program pembelajaran untuk pemberdayaan perempuan dengan menumbuhkembangkan kemampuan berwirausaha.

Atas dasar studi pendahuluan dan identifikasi bersama masyarakat, maka bidang usaha yang menjadi objek penelitian ini adalah usaha aneka kue. Bidang usaha ini dipilih karena keterampilan aneka kue merupakan jenis keterampilan yang sangat dekat dengan perempuan. Keterampilan ini juga sangat tepat dikembangkan menjadi lapangan usaha karena kue telah menjadi kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, masyarakat Minang khususnya di Kabupaten Solok memiliki kekayaan tradisi aneka kue yang dapat digali dan dikembangkan sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi. Letak Kabupaten Solok yang berbatasan langsung dengan kota Padang, ibu kota Propinsi Sumatera Barat, adalah peluang pasar yang potensial.

Sesuai dengan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah; bagaimanakah model pelatihan dan pembinaan kewirausahaan berkelanjutan sebagai upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Solok ? Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Bagaimanakah model pendidikan kewirausahaan yang selama ini berkembang melalui jalur PLS di Kabupaten Solok ?

2. Bagaimanakah model konseptual pelatihan dan pembinaan kewirausahaan berkelanjutan usaha aneka kue sebagai upaya pemberdayaan perempuan?
3. Bagaimanakah mengimplementasikan (uji coba) model pelatihan dan pembinaan kewirausahan tersebut di lapangan yang sesungguhnya ?
   a) Bagaimanakah model pembelajaran keterampilannya ?
   b) Bagaimanakah model pembinaan berkelanjutannya ?
4. Bagaimanakah keefektifan model tersebut berdasarkan dampaknya terhadap tumbuhkembangnya wirausaha perempuan ?
5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan model pelatihan dan pembinaan kewirausahaan berkelanjutan ini ?

D. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, perlu dikemukakan definisi operasionalnya untuk menjadi pegangan bagi peneliti, yaitu;

1. Model

Abdulhak (1996:11) mengemukakan bahwa model adalah representasi sederhana mengenai aspek yang terpilih dari kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu. Model juga dapat berarti alat artifisial untuk menyusun secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman seseorang tentang suatu masalah atau penggambaran dari satu sistem sehingga lebih mudah dipahami dan dijelaskan. Dalam konteks pelatihan atau pembelajaran, model adalah pola atau potret dari proses pelatihan atau pembelajaran sehingga merupakan *blue print* dari keseluruhan proses pembelajaran itu sendiri (Mayo & DuBois, 1987:31-32,

Mappa, 1994:78). Dalam penelitian ini model adalah representasi atau potret dari keseluruhan proses pelatihan dan pembinaan kewirausahaan berkelanjutan sebagai upaya pemberdayaan perempuan.

2. Pelatihan dan Pembinaan Berkelanjutan

Pelatihan (*training*) adalah praktek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang difokuskan kepada hasil identifikasi dan melalui proses pembelajaran yang terencana. Inti dari pelatihan adalah proses belajar yang berorientasi pada penguasaan keterampilan tertentu yang bersifat praktis dan berdasarkan kebutuhan yang dirasakan atau *felt need* (Bird, 1992:3-4, Laird, 1985:14-19).

Sebagai sebuah proses, pelatihan bukanlah suatu program yang lengkap dan bersifat seketika atau instant. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik pelatihan memerlukan tindak lanjut atau *follow up*. Tindak lanjut tersebut, dalam penelitian ini, disebut pembinaan.

Pembinaan adalah pemberian dukungan dari pihak yang melatih atau pihak lain yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membantu memecahkan masalah yang dihadapi ketika mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh salama pelatihan. Pembinaan dapat terjadi dalam bentuk pelatihan tambahan, kelompok usaha, konseling, kerjasama, kemitraan, pendampingan dan sebagainya (Sumantri, 2000: 44, Hidayat dan Syamsulbahri, 2001:60). Atas dasar pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan pembinaan dalam penelitian ini adalah upaya terencana dan sistematis untuk membantu seseorang atau

sekelompok orang agar mampu menerapkan hasil pelatihan ke dalam situasi yang sesungguhnya. Pelatihan dan Pembinaan Berkelanjutan adalah program pelatihan yang diikuti dengan pembinaan yang terus menerus dalam satu kurun waktu tertentu.

3. Kewirausahaan

Istilah kewirausahaan berasal dari akar kata wirausaha. Wirausaha dalam penelitian ini diartikan sama dengan wiraswasta. Hal ini mengacu kepada penjelasan Alma (2005:23);

> Ada pandangan yang menyatakan bahwa wiraswasta sebagai pengganti dari istilah entrepreneur. Ada juga pandangan untuk istilah entrepreneur digunakan wirausaha, sedangkan untuk istilah entrepreneurship digunakan istilah kewirausahaan. Kesimpulannya ialah istilah wiraswasta sama saja dengan wirausaha, walaupun rumusannya berbeda tetapi isi dan karakteristiknya sama. Namun ada perbedaan fokus antara kedua istilah tersebut. Wiraswasta lebih fokus pada objek, ada usaha yang mandiri, sedangkan wirausaha lebih menekankan pada jiwa, semangat, kemudian diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Suhamijaya (2003:67), Brandt (1991:61-67) dan Soemanto (1984:42-45). Mereka menyatakan bahwa kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama dan tidak perlu perdebatan untuk membedakannya.

Wirausaha adalah keperibadian atau sikap mental yang menggambarkan keunggulan sedangkan kewirausahaan adalah tahapan atau proses yang dilalui seseorang sehingga mereka berhasil menjadi wirausaha, berhasil dalam kemandiriannya dalam satu rentang waktu tertentu. Proses untuk menjadi wirausaha tersebut dapat terjadi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan, atau belajar sendiri dari pengalaman (Sudjana, 2000:130, Riyanti, 2003:15).

4. Dampak

Dampak atau *outcome* adalah akibat lain yang ditimbulkan atau pengaruh langsung maupun tidak langsung dari satu program pembelajaran, misalnya meningkatnya pendapatan, makin tingginya produktifitas, dan sebagainya. Istilah dampak juga dapat berarti; "pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif maupun negatif dari satu tindakan" (Bird, 1992:44). Dalam konteks penelitian ini, dampak diartikan sebagai pengaruh positif dari porgam pelatihan dan pembinaan berkelanjutan berupa keuntungan sosial ekonomi terhadap peserta warga belajar yang menjadi subjek penelitian dan masyarakat sekitarnya. Keuntungan tersebut dapat dilihat dalam bentuk meningkatnya pendapatan keluarga, terbukanya lapangan kerja baru, kemandirian, dan keuntungan sosial ekonomi lainnya.

5. Pemberdayaan Perempuan

Konsep pemberdayaan perempuan atau memberdayakan perempuan adalah konsep yang berpijak pada ide untuk menempatkan perempuan sebagai subjek dari dunianya sendiri. Konsep ini mengandung dua kecendrungan *Pertama;* pemberdayaan merupakan proses memberikan atau mengalihkan kekuatan dan kekuasaan kepada perempuan agar ia lebih berdaya. *Kedua;* menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi perempuan agar memiliki kemampuan atau menjadi lebih mampu menentukan pilihan hidupnya (Prijono & Pranarka, 1996:199-203).

Pemberdayaan sering pula diartikan sebagai proses *"helping man to become more aware of and responsible for himself and his world"* (Srinivansan, 1992:6), atau *"to help people gaining an understanding of and control over social*

economic, and/or political forces in order to improve their standing in society" (Kindervatter 1979:62-65). Dalam praktek Pendidikan Luar Sekolah (PLS), istilah pemberdayaan sering digunakan dalam konteks peningkatan kemampuan dan kemandirian sosial, budaya, politik dan ekonomi.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan model pelatihan dan pembinaan kewirausahaan berkelanjutan sebagai upaya pemberdayaan perempuan agar mereka mampu tumbuh dan berkembang menjadi wirausaha, mandiri, dan tangguh serta mampu menjadi bagian dari kekuatan sosial ekonomi masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah;

1. Mengungkap dan menelaah model pendidikan kewirausahaan melalui jalur PLS yang telah berkembang di Kabupaten Solok
2. Menyusun model konseptual pelatihan dan pembinaan kewirausahaan berkelanjutan usaha aneka kue sebagai upaya pemberdayaan perempuan
3. Mengujicobakan model konseptual pelatihan dan pembinaan kewirausahaan berkelanjutan untuk memperoleh model yang efektif
   a) Memperoleh model pembelajaran keterampilan yang efektif

b) Mendapatkan model pembinaan berkelanjutan yang sesuai dengan karakteristik dan usaha warga belajar

4. Menganalisis keefektifan model tersebut berdasarkan dampaknya terhadap tumbuh kembangnya wirausaha perempuan.
5. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan model pelatihan dan pembinaan kewirausahaan berkelanjutan

F. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian ilmiah tentang konsep dan model Pendidikan Luar Sekolah (pendidikan non-formal) melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat seperti yang diharapkan pasal 26 UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003.
2. Manfaat praktis; diharapkan dapat menjadi masukan bagi perencana pendidikan dan pengambil kebijakan tentang bagaimana sebaiknya program pendidikan kewirausahaan melalui PLS sebagai upaya pemberdayaan perempuan

G. Kerangka Berfikir Penelitian

Perempuan di pedesaan pada hakekatnya bisa pula menjadi wirausahan yang sukses dan produktif asalkan mereka memiliki akses dan peluang untuk itu. Apabila potensi SDM perempuan dikembangkan dengan optimal, diyakini akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan upaya mengentaskan kemiskinan. Strategi pemberdayaan berupa pemberian bantuan material atau

proteksi justru mempertinggi ketergantungan masyarakat terhadap uluran tangan orang lain. Ketergantungan tersebut pada hakekatnya merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan (Supriatna, 1997:37, Todaro, 2000: 455)

Berwirausaha dengan membuka usaha secara mandiri di rumah atau di luar rumah, merupakan pilihan yang sangat tepat untuk memberdayakan potensi sosial ekonomi perempuan. Kesimpulan ini tergambar pada penelitian ADB di Indonesia (2002:18-20) dan penelitian Todaro di beberapa negara berkembang (Todaro, 2000:358). Gagasan serupa ditemukan pula dalam Alma (2005:2-3) dan Sumantri (2000:144-149). Pokok-pokok pikiran yang dapat dipetik dari penjelasan para ahli dan praktisi di atas adalah;

1) Berwirausaha merupakan pilihan bijak untuk mensiasati hambatan sosial budaya dan sempitnya lapangan kerja. Sifat dan naluri perempuan yang hemat, cermat dan hati-hati adalah modal dasar dalam membentuk perilaku wirausaha yang suskes
2) Perempuan yang membuka usaha sendiri di rumah atau di luar rumah masih memiliki banyak waktu untuk mengurus dan memberikan perhatian terhadap keluarga.
3) Lapangan kerja yang semakin kompetitif serta perlakuan yang diskriminatif adalah hambatan tersendiri bagi perempuan. Meskipun persamaan nilai dan hak dalam memperoleh pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik telah diatur oleh undang-undang, namun masalah ketimpangan dan ketidaksetaraan dalam hal ini masih merupakan tantangan dan hambatan nyata bagi kaum perempuan.

Pendidikan kewirausahaan melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan apabila dikelola secara baik akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara agresif (Suhamijaya, 2003:137). Lahirnya wirausaha perempuan diyakini berdampak positif terhadap perempuan lainnya seperti; terbukanya lapangan kerja baru, dapat menurunkan dampak negatif kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kesejahteraan keluarga, serta keuntungan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitarnya. Namun demikian, keberhasilan program pelatihan dan pembinaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor.

Moulton (1997:9), Banerji (2002:4-5) dan Sudjana (2000a:41) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dominan mempengaruhi: (1) raw input, (2) instrumental input, (3) proses belajar; interaksi edukasi dalam proses belajar mengajar, (4) lingkungan sosial budaya, ekonomi, bahkan politik, (5) output (hasil belajar), dan (6) outcome atau dampak pembelajaran yang dirasakan oleh peserta dan masyarakat sekitarnya. Raw input berhubungan dengan sumber daya yang menjadi sasaran (*trainee*), yaitu SDM perempuan itu sendiri (pendidikan, pengalaman, minat, latar belakang sosial ekonomi dan kemauan untuk berubah). Instrumental input berhubungan dengan sumber belajar, sarana dan program belajar serta strategi dan metode pembelajaran. Masukan lingkungan berhubungan dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang ada di masyarakat. Di samping variabel di atas, juga terdapat unsur lainnya yang tidak boleh diabaikan. Faktor pengaruh yang tidak bisa sepenuhnya diperidiksi dan dikontrol, misalnya; perkembangan dan perubahan kecenderungan masyarakat, gejolak sosial, krisis

ekonomi, dan sebagainya yang memicu munculnya kebutuhan belajar baru. Sudjana (2000a;40-41) menyebutnya dengan masukan lain atau *other input*.

Alma (2005:5-7) menggolongkannya kepada tiga faktor; (1) faktor personal; menyangkut aspek kepribadian seseorang, (2) faktor sosiologis, meliputi interaksi sosial bahkan budaya yang mengitari, dan (3) faktor lingkungan; lingkungan alam, lingkungan sosial (masyarakat), maupun lingkungan budaya. Lingkungan sosial budaya dapat pula digolongkan kepada; (a) lingkungan sosial budaya di mana seseorang dibesarkan, (b) lingkungan sosial budaya di mana seseorang bermukim, dan (c) lingkungan sosial budaya dari luar yang mempengaruhi melalui interaksi atau melalui media komunikasi.

Seorang wirausaha setidaknya membutuhkan keahlian produksi, manajemen, dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Keahlian tersebut tidak sepenuhnya dapat dipelajari melalui pendidikan atau pelatihan. Suryana, (2003:39) dan Alma, (2005, 7-10) menjelaskan bahwa kemampuan berwirausaha, mulai dari perintisan sampai tumbuh dan berkembang menjadi wirasuaha yang kuat dan tangguh, merupakan fungsi dari perilaku yang mengkombinasikan inovasi dan kreatifitas, kerja keras serta keberanian menghadapi resiko untuk memperoleh peluang.

Proses kewirausahaan setidaknya terdiri dari inovasi, faktor pemicu, implementasi dan pertumbuhan. Inovasi adalah kemampuan menerapkan kreatifitas dalam rangka memecahkan masalah. Inovasi dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, seperti; pendidikan, organiasasi, budaya, dan lingkungan. Faktor pemicu adalah faktor-faktor pendorong seperti keadaan

ekonomi, pengalaman, keterampilan, lingkungan, dan motiv untuk berprestasi. Faktor-faktor tersebut mendorong tumbuhnya kreativitas dan kemampuan merintis usaha sampai kemudian tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang kuat dan tangguh. Pelatihan dan pembinaan berkelanjutan dapat menjadi bagian dari keseluruhan proses tersebut Suryana (2003:39) dan Alma (2005, 7-10).

Apabila dikaitkan dengan fokus penelitian, maka akan terlihat hubungan seperti pada gambar 1.2 berikut ini:

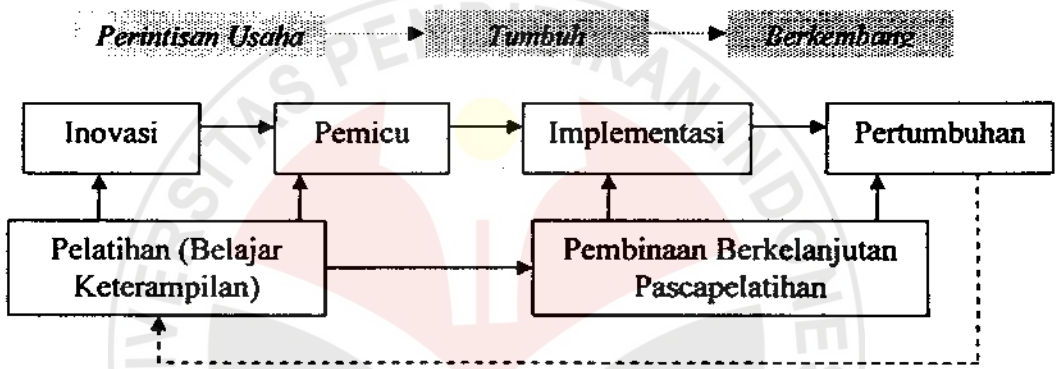

Sumber: diolah dari Suryana, 2003:39, Alma, 2005:7-10

Gambar 1.2: Kaitan Fokus Penelitian dengan Proses Kewirausahaan

Sumber daya perempuan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah masukan mentah pelatihan dan pembinaan kewirausahaan berkelanjutan. Selain interaksi dan proses pembelajaran, segala aspek yang berkaitan dengannya, seperti; latar belakang pendidikan, keadaan keluarga, lingkungan sosial dan budaya, bakat, pengalaman kerja, dan proses belajar yang terjadi secara informal akan sangat berpengaruh terhadap hasil serta dampak pelatihan dan pembinaan kewirausahaan ini. Paradigma atau kerangka berfikir penelitian ini dikembangkan berdasarkan pemahaman konseptual tersebut, seperti dijelaskan pada gambar 1.3;

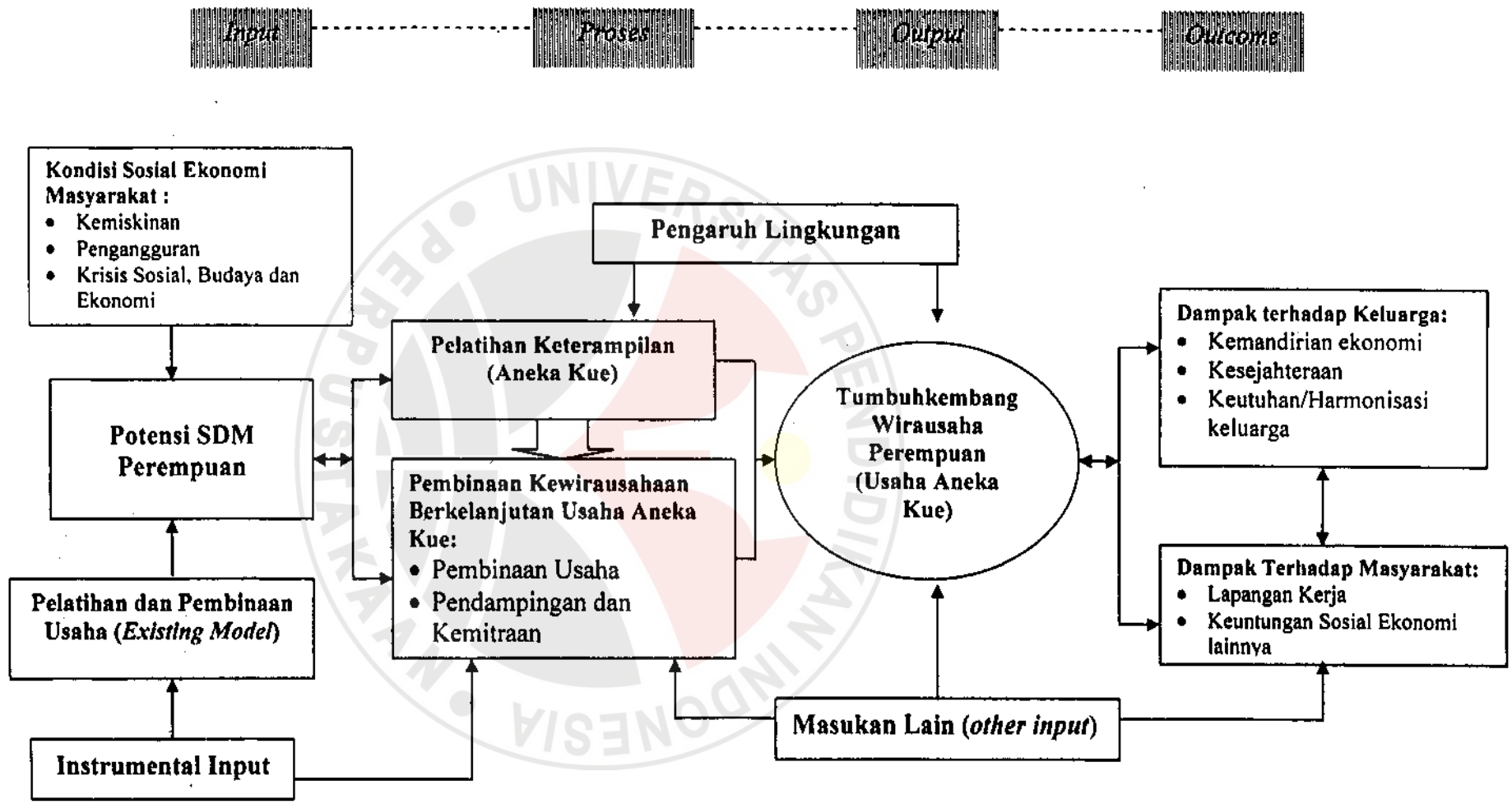

Gambar 1.3. Paradigma Penelitian